BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak masa Penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonomi (Gemente) maupun swasta ataupun patungan antara pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengeloloa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu Bandoengsche Electricitiet Maatschappij (BEM), yang berdiri pada tahun1905. Pada tanggal 1 januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan Gemeenschapplijk Electricitet Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaris MR. Andrian Hendrik Van Ophuisen No. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja diseluruh pulau jawa.

Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Sampai sekarang

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia, kerena pada tahun tersebut dimulai adanya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 17 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan perturan pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat kecuali DKI jaya dan Tangerang.

Berdasarkan peraturan pemerintah no. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara.

Berdasarkan peraturan Mentri PUTL No.13/PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas, dan wilyah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum listrik negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian.

PT. PLN (Persero) atau dengan istilah umum disebut PLN, adalah BUMN yabg diserahi tugas oleh pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik ke seluruh Indonesia. PLN sebagai agen pembangunan juga mempunyai tugas merintis kegiatan-kegiatan usaha kelistrikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi. Adapun PLN Distribusi Jawa Barat adalah salah satu unit PLN yang melaksanakan pendistribusian tenaga listrik di Wilayah Jawa Barat.

Sebagai BUMN yang memilika tanggung jawab besar dalam mengemban misi sosial disamping mencari keuntungan bagi perusahaan, PLN sering mendapat perhatian serta sorotan Masyarakat luas. Maka dari itu PLN haruuus selalu meningkatkan diri terutama dalam hal memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sampai saat ini jumlah pelanggan listrik di PLN Distribusi Jawa Barat telah mencapai empat juta lebih dengan rasio elektrifikasi sebesar 52,75%, sebagian besar pelanggan berada di pedesaan dimana dari 6353 telah dilistriki sebanyak 5324 atau 83,80%. Untuk melayani langganan yang terbesar di 15 cabang tersebut, PLN Distribusi Jawa Barat mengerahkan tidak kurang dari 4000 pegawai dan dibantu oleh KUD sebagai mitra kerja dipedesaan.

Tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran PLN, khususnya PLN Distribusi Jawa Barat adalah:

1. Jumlah kebutuhan kelistrikan yang tinggi, lebih dari 15% per tahun.
2. Jumlah dan mutu sumber daya yang masih perlu ditingkatkan.
3. Masuknya listrik swasta.

Menghadapi tantangan tersebut, PLN perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan terus meningkatkan kemampuan propesionalisme

sumber daya manusia serta melakukan langkah-langkah terobosan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan adalah pemimpin Distribusi
2. Unsur pembantu pimpinan adalah :
    - Bidang Perencanaan
    - Bidang Konstruksi
    - Bidang Pengusahaan
    - Bidang Keuangan
    - Bidang Kepegawaian dan Administrasi
3. Unsur Pelaksana adalah :
    - Unit Cabang
    - Pengatur Distribusi
    - Unsur Pengawasan adalah Kontrol Intern

Pemimpin

Pemimpin mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Memimpin, mengurus dan mengelola Distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan Distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Distribusi.

- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Distribusi
- Mewakili Distribusi didalam dan diluar pengadilan
- Melaksanakan kebijaksaan umum dalam mengurus Distribusi yang telah digariskan oleh Direksi.
- Menetapkan kabijaksanaan Distribusi sesuaI dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Direksi.
- Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan Distribusi lengkap dengan anggaran keuangan.
- Mengadakan dan memelihara tata buku dan Administrasi Distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan.
- Menetapkan gaji pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan kebijaksanaan Distribusi dibidang perencanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik dan sumber daya manusia.
- Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan Distribusi berdasarkan kebijaksaan Direksi dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengendalikan pelaksaan tugas para deputi pemimpinb dan kepala kontrol Intern.

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan Direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik.

Deputi Pemimpin Bidang Perencanaan

Tugas pokok bidang perencanaan, adalah merumuskan rencana korporat distribusi, pengembangan sistem pendistribsian tenaga listrik, kebutuhan investasi, penyediaan data dan informasi serta melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja distribusi.

Deputi Pemimpin Bidang Konstruksi

Tugas pokok bidang konstruksi, adalah mengelola pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

Deputi Bidang Pengusahaan

Tugas pokok bidang pengusahaan adalah merencanakan, mengendalikan dan membina pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik pelayanan kepada pelanggan tenaga listrik dan listrik pedesaan.

Deputi Pemimpin Bidang Kepegawaian dan Administrasi

Tugas pokok bidang kepegawaian dan administrasi adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan umum, serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat.

Deputi Pemimpin Bidang Keuangan

Tugas pokok bidang keuangan adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keuangan dan akuntansi pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuaungsi bagian keuangan meliputi:

- Penyusunan dan pemantauan anggaran pendapatan dan belanja distribusi serta pembinaan tarif dasar listrik.
- Pengelolaan pendapatan dana.
- Pengelolaan aliran uang.
- Pembelanjaan pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
- Pembelanjaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
- Pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi.
- Pelaksanaan tata usaha langganan.
- Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagian keuangan meliputi:

- Bagian Anggaran
- Bagian Keuangan
- Bagian Akuntansi
- Bagian tata usaha langganan

Bagian Anggaran

Tugas pokok bagian anggaran adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja pengusahaan, serta kebutuhan dana pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

Bagian Keuangan

Tugas pokok bagian keuangan adalah membina dan mengendalikan keuangan, pembelanjaan pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik, serta melaksanakan tata usaha keuangan.

Bagian Akuntansi

Tugas pokok bagian akuntansi adalah melaksanakan akuntansi umum dan pengusahaan, serta akuntansi pembangunan dan sarana pendistribusian tenaga listrik

Fungsi bagian akuntansi antara lain, yaitu:

- Pelaksanaan akuntansi umum Distribusi
- Pelaksanaan akuntansi pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik
- Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bagian akuntansi terdiri atas:

1. Seksi Akuntansi Perusahaan
2. Seksi Akuntansi Pengusahaan

Ad.1. Seksi Akuntansi Pengusahaan

Tugas pokok seksi akuntansi pengusahaan adalah melaksanakan kegiatan akuntansi umum Distribusi dan pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuangannya.

Fungsi seksi akuntansi antara lain yaitu:

- Pelaksanaan akuntansi umum distribusi
- Pelaksanaan akuntansi pengushaan pendistribusian tenaga listrik
- Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan

Ad.2. Seksi akuntansi Konstruksi

Tugas pokok seksi akuntansi kontruksi adalah melaksanakan kegiatan akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta akuntansi aktiva tetapnya.

Fungsi dari seksi akuntansi kontruksi yaitu:

- Pelaksanaan akuntansi pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
- Pelaksanaan akuntansi aktiva tetap sarana pendistribusian tenaga listrik.

Bagian Tata Usaha Langganan

Tugas pokok bagian tata usaha langganan adalah melaksanakan dan membina sistem tata usaha langganan penjualan tenaga listrik serta tarif dan hasil usaha.

2.3 Aspek Kegiatan Perusahaan

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai kegunaan yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :

- Meningkatakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
- Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

- Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM